



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**LKJIP
2023**

KATA PENGANTAR

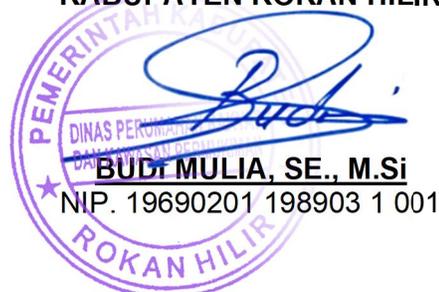
Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagansiapiapi, 25 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE., M.Si
NIP. 19690201 198903 1 001

IKHTISAR

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 untuk melaksanakan 7 Program, 18 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar **Rp 64.471.588.491,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 44.718.496.503,00,-** atau sebesar **69,36%**. Alokasi anggaran tersisa sebesar **Rp. 19.753.091.988,00,-**.

Pada indikator kinerja Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 57,26%. Hal ini karena terdapat beberapa sub indikator kinerja tidak dilaksanakan pada APBD tahun 2023 seperti sub indikator 2, 6 dan 11 namun rata-rata indikator kinerja tahun 2023 sudah mencapai 73,41% sehingga termasuk dalam kategori Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya terdapat lonjakan yang signifikan dari 42,90% naik menjadi **73,41%**.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2023 oleh inspektorat nomor : 10/R/LHE/INSP/2023 bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir memperoleh nilai **74,19** atau **BB** dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan pada tahun lalu memperoleh nilai 72,69 atau BB. Jika dilihat pada tabel di atas, kinerja sasaran meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah dikategorikan Sangat Berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
2. Fungsi.....	1
3. Struktur Organisasi.....	2
4. Sumber Daya Manusia.....	2
C PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI.....	4
D TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA ...	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021	7
1). Pernyataan Visi dan Misi	7
2). Sasaran dan Kebijakan Strategis.....	8
3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	19
1. Misi Kesatu.....	19
2. Misi Kelima.....	34
B. ASPEK KEUANGAN.....	37
C. EVALUASI KINERJA	39
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	39
BAB IV PENUTUP.....	40
A. KESIMPULAN	40
B SARAN.....	40
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2023	42
LAMPIRAN	43

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 96 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Tugas pokok Dinas Perkim adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman;
- Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, air bersih, sanitasi serta prasarana dan sarana utilitas umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Ketata Usahaan (TU)
 - Subbagian Perencanaan dan Program
- iii. Bidang Perumahan, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
 - Seksi Pengembangan Perumahan
- iv. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 - Seksi Kawasan Pendataan Permukiman
- v. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Peningkatan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- vi. UPTD
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional

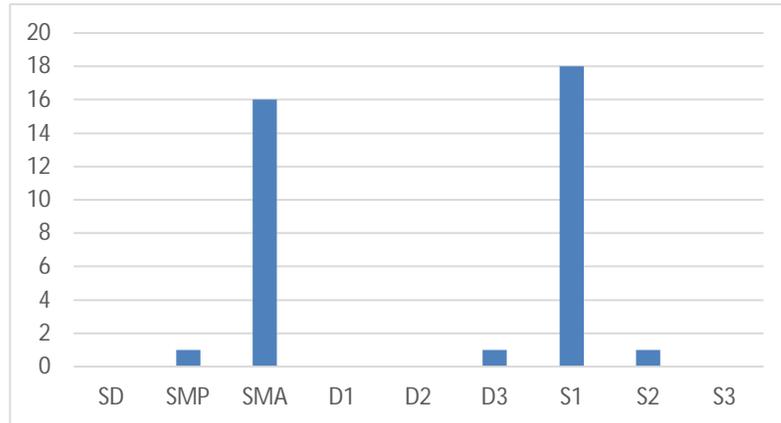
4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sejumlah 37 orang pegawai dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada 31 Desember 2023

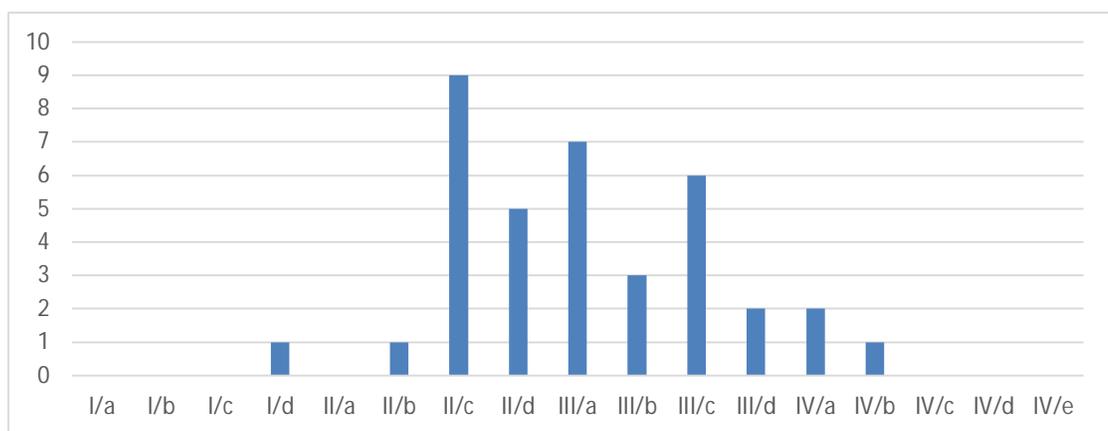
Pegawai	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SMU/SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
PNS	-	1	16	-	-	1	-	18	1	-	37



Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada 31 Desember 2023

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada 31 Desember 2023

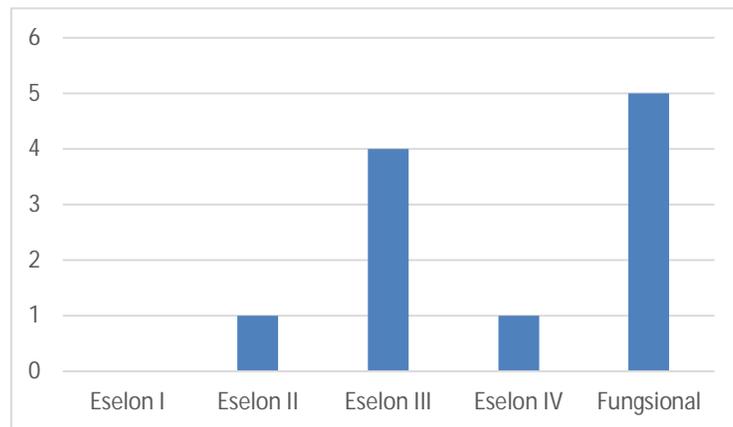
Pegawai Negeri Sipil	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Total
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Jumlah	-	-	-	1	-	1	9	5	7	3	6	2	2	1	-	-	-	37
Total	1				15				18				2					37



Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada 31 Desember 2023

Tabel 1.3 : Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Pada 31 Desember 2023

Pejabat							
Eselon				Struktural	Fungsional	Jumlah	Keterangan
I	II	III	IV				
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	
0	1	4	1	6	5	11	



Grafik Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pada 31 Desember 2023

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan APBD Perubahan dilakukan hampir diakhir tahun, sehingga proses penginputan dan administrasi menjadi mendesak;
2. Pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan tidak maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas, karena waktu pelaksanaan yang sedikit dan mendesak ditengah kondisi iklim/cuaca yang tidak baik;
3. Revisi anggaran yang berulang kali dilakukan terkait kebijakan Pemerintah Daerah berupa rasionalisasi anggaran;
4. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis dan managerial, baik secara kualitas maupun kuantitas;
5. Terbatasnya pengetahuan aparatur tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan.

D. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (*performance results*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Pelaporan ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

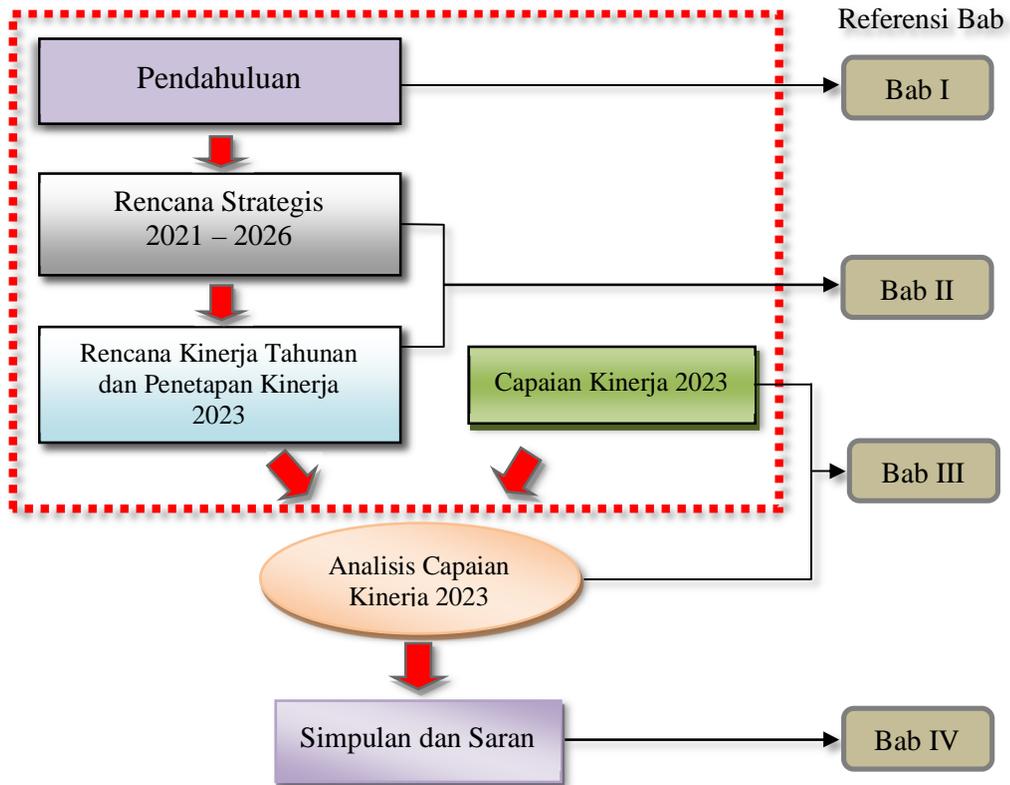
Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, tahun anggaran 2023 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir ini, apabila diilustrasikan dalam gambar adalah seperti pada halaman berikut :



Gambar 1.1 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah disahkan tanggal 17 Januari Tahun 2021. Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1). Pernyataan Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis.

Visi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 : ***“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”***. Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

1. **Maju** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
2. **Religius** Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
3. **Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
4. **Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Perekonomian** Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Visi pembangunan Rokan Hilir yang ke-4 yaitu **Infrastruktur**.

1.2. Misi

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Berdasarkan misi ke 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dapat menjabarkan program-program dengan tujuan meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman melalui 7 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2). Sasaran dan Kebijakan Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur yang merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai yang merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
VISI : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal		
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir		
Meningkatkan indeks kepuasan layanan Infrastruktur	Meningkatnya indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi		
Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD

3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*)

yang setingkat lebih tinggi dari unit kerja dibawahnya. Indikaor kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

Visi : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
					2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur	Meningkatnya Indeks kepuasan Layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	74,71	77	78	79	80	81	81
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

Tabel 2.3
Tujuan Dan Sasaran, Strategi Arah Kebijakan Dan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Visi : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
		INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir			
Meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur	Meningkatnya Indeks kepuasan Layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					Target Kinerja Akhir Periode
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur	Meningkatnya Indeks kepuasan Layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	$= \frac{\sum x}{n}$ <p>x = Persentase komponen Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>n = Jumlah komponen Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	74,71	77	78	79	80	81	81
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggara n pemerintah	Nilai AKIP OPD	= Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

Tabel 2.5 Target Indikator pada Masing-Masing Komponen Pelayanan Infrastruktur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	PEMBAGI	KONDISI AWAL	TARGET				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir												
1.	Meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	$\Sigma x/n$ x = Persentase komponen Perumahan dan Kawasan Permukiman n = Jumlah komponen Perumahan dan Kawasan Permukiman								
			1 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi RLH bagi Korban Bencana atau Relokasi Program / Jumlah Target Penyediaan dan Rehabilitasi RLH bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DISPERKIM	535 Unit	N/A	95	110	110	110	110
			2 Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha / Jumlah Target Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang akan ditata dan ditingkatkan kualitasnya	DISPERKIM	4 Kws	N/A	0	1	1	1	1
			3 Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki / Jumlah Target RTLH yang akan diperbaiki	DISPERKIM	774 Unit	N/A	14	190	190	190	190
			4 Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun atau diperbaiki / Jumlah Target Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun atau diperbaiki	DISPERKIM	148 Km	N/A	40	24	26	28	30
			5 Persentase Peningkatan Jembatan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Unit Jembatan Lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun atau diperbaiki / Jumlah Target Unit Jembatan Lingkungan yang dibangun atau diperbaiki	DISPERKIM	135 Unit	N/A	55	17	19	21	23
			6 Persentase Penyediaan Penerangan Jalan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Panjang Jalan di perumahan dan kawasan permukiman dengan penyediaan Penerangan Jalan / Jumlah Target Panjang Jalan di perumahan dan kawasan permukiman dengan penyediaan Penerangan Jalan	DISPERKIM	3,35 Km	N/A	1,15	0,55	0,55	0,55	0,55

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	PEMBAGI	KONDISI AWAL	TARGET				
								2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7 Persentase Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun atau diperbaiki / Jumlah Target Panjang Drainase Lingkungan yang dibangun atau diperbaiki	DISPERKIM	26,00 Km	N/A	6	5	5	5	5
			8 Persentase Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penduduk Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum/ Total Penduduk	DISPERKIM	646.791 Jiwa	N/A	14.246	31.429	30.994	30.994	30.994
			9 Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penduduk Terlayani Sistem Air Limbah Domestik/ Total Penduduk	DISPERKIM	646.791 Jiwa	N/A	3.154	10.440	10.984	11.528	11.636
			10 Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Ibadah di perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas sarana prasarana / Jumlah Target Rumah Ibadah di perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas sarana prasarana	DISPERKIM	121 Unit	N/A	61	15	15	15	15
			11 Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan di perumahan dan kawasan permukiman dengan penyediaan RTnH / Jumlah Target Kawasan di perumahan dan kawasan permukiman dengan penyediaan RTnH	DISPERKIM	4 Kws	N/A	0	1	1	1	1
			12 Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah TPU di perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan Sarana Prasarana / Jumlah Target TPU di perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan Sarana Prasarana	DISPERKIM	95 TPU	N/A	23	18	18	18	18
MISI 5: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi												
1.	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	DISPERKIM		BB	BB	BB	BB	BB	A

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pencapaian target, maka dibuat rencana kinerja untuk setiap kegiatan yang disusun dalam suatu program tertentu. Perjanjian kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebagai wujud nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja OPD.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring/evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan berikut

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan stratejik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2023. Sasaran stratejik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	Persentase capaian pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman	78%
2	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	=	2.542.997.171	APBD-P
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	=	976.225.895	APBD-P
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=	8.639.233.073	APBD-P
4	Program Pengembangan Perumahan	=	2.004.178.239	APBD-P
5	Program Kawasan Permukiman	=	275.000.000	APBD-P
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	=	11.178.656.974	APBD-P
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	=	38.855.297.139	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Penetapan Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Hasil Review Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dengan Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/encana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
---	--

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2023 sasaran strategis yang akan dicapai didukung oleh 6 Program dengan 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

a. Misi Kesatu

Misi kesatu yaitu : Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir, dalam rencana kerja tahun 2023 direncanakan dapat terwujud melalui 6 program dengan 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 1

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023
	Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir			
1.	Meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	78

Dalam pencapaian sasaran strategis pada misi kesatu ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 12 (dua

belas) sub indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 1

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	n/a	110 Unit	12 Unit	10,91 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				10,91 %

Pada sub indikator persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota terdapat realisasi 12 unit dari target 110 yang sudah ditentukan pada rencana kerja strategis 5 tahun dengan persentase sebesar 10,91% sehingga masuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

Tabel 3.3. Penanganan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota s/d tahun 2023

Uraian	2022	2023
Penanganan rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	-	12 Unit

Tabel 3.4. Realisasi keuangan program yang mendukung penyediaan dan rehabilitasi rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pengembangan Perumahan	2.004.178.239	1.973.870.032	98,49 %
	Jumlah	2.004.178.239	1.973.870.032	98,49 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terserap 98,49% dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

2. Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 2

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	n/a	1 Kws	0 Kws	0%
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				0%

Pada sub indikator persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, tidak terdapat realisasi, karena pada tahun 2023 ini sedang menyusun Naskah Akademis Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan juga menyusun Naskah Akademis Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.6. Penanganan Kawasan Kumuh s/d tahun 2023

Uraian	2022	2023
Penanganan kawasan kumuh	-	-

Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Permukiman	275.000.000	0	0 %
	Jumlah	275.000.000	0	0 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, terserap 0% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi program Kawasan Permukiman sebenarnya bukan tidak ada, melainkan karena tunda bayar yang rencananya akan dibayar pada tahun berikutnya.

3. Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 3

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.	100 %	190 Unit	208 Unit	109,47 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				109,47 %

Pada sub indikator persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, realisasi lebih besar dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis, karena pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi Riau untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 50 unit. Sedangkan dari dana APBD terdiri dari pembangunan rumah layak huni sebanyak 38 unit dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 120 unit dengan persentase sebesar 109,47 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.9. Pembangunan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	Unit		Unit Total	Sumber Dana
	2022	2023		
Pembangunan Baru	19	38	331	APBD
Pembangunan Baru	60	50	223	Bantuan Keuangan
Peningkatan Kualitas	-	120	687	DAK dan APBD
Unit Total	79	208	1241	

Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 287 unit. Pada periode tahun 2022-2023 target pembangunan rumah layak huni sebanyak 204 unit, sehingga sudah melebihi dari target.

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	11.178.656.974	9.798.394.410	87,65%
	Jumlah	11.178.656.974	9.798.394.410	87,65%

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota terserap 87,65% dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

4. Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 4

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,40 %	24 Km	9,86 Km	41,08 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				41,08 %

Pada sub indikator kinerja persentase peningkatan jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman, dengan persentase hanya sebesar 41,08 % dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis, hal ini karena angka target tahun 2023 sangat tinggi dan ditambah lagi alokasi anggaran tahun 2023 sangat terbatas sehingga mengakibatkan indikator kinerja persentase peningkatan jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

Tabel 3.12. Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	2022	2023	Total (Km)	Sumber Dana
	(Km)	(Km)		
Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan	4,56	9,86	82,03	APBD

Tabel 3.13. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.485.984.000	8.401.566.380	62,30 %
	Jumlah	13.485.984.000	8.401.566.380	62,30 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman terserap 62,30 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**. Hal ini dikarenakan ada 27 kegiatan yang masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

5. Persentase peningkatan jembatan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 5

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase peningkatan jembatan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman	29,09 %	17 Unit	11 Unit	64,71 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				64,71 %

Pada sub indikator kinerja persentase peningkatan jembatan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis, hal ini karena alokasi anggaran tahun 2023 sangat terbatas dengan persentase sebesar 64,71% sehingga mengakibatkan indikator kinerja persentase peningkatan jembatan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Tabel 3.15. Jembatan Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	2022	2023	Total (Unit)	Sumber Dana
	(Unit)	(Unit)		
Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan Lingkungan	16	11	89	APBD

Tabel 3.16. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Peningkatan Jembatan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.108.700.000	1.762.234.900	83,57 %
	Jumlah	2.108.700.000	1.762.234.900	83,57 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja persentase peningkatan jembatan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman terserap 83,57 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Berhasil**. Ada 2 kegiatan pembangunan box culvert yang masuk kedalam daftar tunda bayar.

6. Persentase Penyediaan Penerangan Jalan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 6

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Penyediaan Penerangan Jalan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	n/a	0,55 Km	0 Km	0 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				0 %

Pada sub indikator persentase penyediaan penerangan jalan di perumahan dan kawasan permukiman tidak terdapat realisasi dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis, karena pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan tersebut masuk kedalam RKPD 2023.

7. Persentase Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 7

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	24,67 %	5 Km	3,68 Km	73,60 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				73,60 %

Pada sub indikator kinerja persentase peningkatan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 73,60%. Hal ini karena alokasi anggaran tahun 2023 sangat terbatas namun indikator kinerja persentase peningkatan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman masih termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Tabel 3.19. Panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	2022	2023	Total (Km)	Sumber Dana
	(Km)	(Km)		
Peningkatan/ Pemeliharaan Drainase Lingkungan	1,48	3,68	19,19	APBD

Tabel 3.20. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.574.837.459	2.627.774.600	57,44 %
	Jumlah	4.574.837.459	2.627.774.600	57,44 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja persentase peningkatan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman terserap 57,44 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**. Hal ini karena ada 12 kegiatan pembangunan drainase lingkungan masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

8. Persentase Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 8

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman	67,95 %	31.429 Jiwa	1.869 Jiwa	5,95 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				5,95 %

Pada sub indikator kinerja peningkatan layanan air minum di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase 5,95%. Hal ini karena alokasi anggaran APBD tahun 2023 sangat terbatas dan biasanya menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

Tabel 3.22. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung

Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.452.997.171	1.765.319.525	71,97 %
	Jumlah	2.452.997.171	1.765.319.525	71,97 %

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja peningkatan layanan air minum di perumahan dan kawasan permukiman terserap 71,97 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Berhasil**. Terdapat 4 kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

9. Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 9

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman	65,07 %	10.440 Jiwa	147 Jiwa	1,41 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				1,41 %

Pada sub indikator kinerja peningkatan layanan air limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 1,41%. Hal ini karena alokasi anggaran APBD tahun 2023 sangat terbatas dan biasanya menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

Tabel 3.24. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	976.225.895	819.102.305	83,90 %
	Jumlah	976.225.895	819.102.305	83,90%

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja peningkatan layanan air limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman terserap 83,90 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Terdapat 1 kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

10. Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 10

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman	59,02 %	15 Unit	52 Unit	346,67 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				100 %

Pada sub indikator kinerja peningkatan kualitas sarana prasarana rumah ibadah di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih besar dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 346,67 % sehingga indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.26. Jumlah rumah ibadah yang Dibangun/Diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	2022	2023	Total (Unit)	Sumber Dana
	(Unit)	(Unit)		
Jumlah rumah ibadah yang Dibangun/Diperbaiki	36	52	111	APBD

Tabel 3.27. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	16.757.540.000	8.374.071.176	49,97 %
	Jumlah	16.757.540.000	8.374.071.176	49,97%

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja peningkatan kualitas sarana prasarana rumah ibadah di perumahan dan kawasan permukiman terserap 49,97 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Kurang Berhasil**. Hal ini karena terdapat 20 kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana rumah ibadah masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

11. Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 11

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Perumahan dan Kawasan Permukiman	n/a	1 Kws	0 Kws	0 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				0 %

Pada sub indikator persentase penyediaan ruang terbuka non hijau di perumahan dan kawasan permukiman tidak terdapat realisasi dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis, karena pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan tersebut masuk kedalam RKPD 2023.

12. Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sub Indikator Kinerja 12

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman	39,13 %	18 TPU	6 TPU	33,33 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				33,33 %

Pada sub indikator kinerja peningkatan sarana prasarana pemakaman di perumahan dan kawasan permukiman, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 33,33 %. Hal ini karena alokasi anggaran APBD tahun 2023 sangat terbatas sehingga indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.

Tabel 3.30. Jumlah peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2023

Uraian	2022	2023	Total (TPU)	Sumber Dana
	(TPU)	(TPU)		
Jumlah Sarana Prasarana Pemakaman Dibangun/ Diperbaiki	9	6	28	APBD

Tabel 3.31. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.050.000.000	967.157.605	92,11 %
	Jumlah	1.050.000.000	967.157.605	92,11%

Penyerapan anggaran dari program yang mendukung pencapaian sub indikator kinerja peningkatan sarana prasarana pemakaman di perumahan dan kawasan permukiman terserap 92,11 % dari anggaran yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Terdapat 1 kegiatan peningkatan sarana prasarana pemakaman masuk kedalam daftar tunda bayar yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

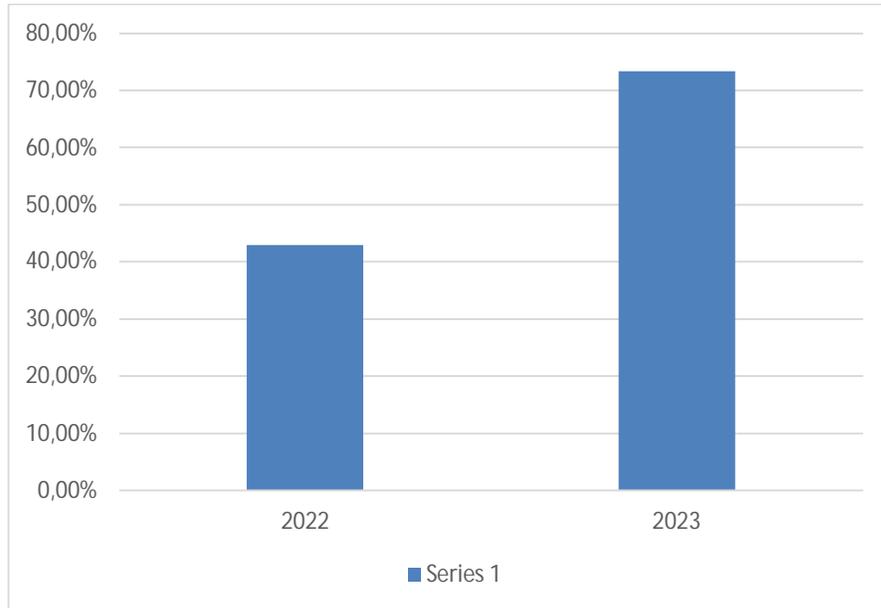
Tabel 3.32. Rekapitulasi Capaian Sub Indikator Kinerja Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		% Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0%	110 Unit	12 Unit	10,91%
2	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0%	1 Kws	0 Kws	0%
3	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	190 Unit	208 Unit	109,47%
4	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,40%	24 Km	9,86 Km	41,08%
5	Persentase Peningkatan Jembatan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,09%	17 Unit	11 Unit	64,71%

6	Persentase Penyediaan Penerangan Jalan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	0%	0,55 Km	0 Km	0%
7	Persentase Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman	24,67%	5 Km	3,68 Km	73,60%
8	Persentase Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman	67,95%	31.429 Jiwa	1.869 Jiwa	5,95%
9	Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman	65,07%	10.440 Jiwa	147 Jiwa	1,41%
10	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman	59,02%	15 Unit	52 Unit	346,67%
11	Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Perumahan dan Kawasan Permukiman	0%	1 Kws	0 Kws	0%
12	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman	39,13%	18 TPU	6 TPU	33,33%
Rata-rata Realisasi Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		33,03%			57,26%

**Tabel 3.33. Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**

INDIKATOR	HASIL	TAHUN 2023		% Capaian
	2022	Target	Realisasi	
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	42,90 %	78 %	57,26 %	73,41 %
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				73,41 %



Grafik 1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, realisasi lebih kecil dari target yang sudah ditentukan pada rencana strategis dengan persentase sebesar 57,26 %. Hal ini karena terdapat beberapa sub indikator kinerja tidak dilaksanakan pada APBD tahun 2023 seperti sub indikator 2, 6 dan 11 namun rata-rata indikator kinerja tahun 2023 sudah mencapai 73,41 % sehingga termasuk dalam kategori **Berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya terdapat lonjakan yang signifikan dari 42,90 % naik menjadi 73,41 %.

Tabel 3.34. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Misi 1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.542.997.171,00	1.765.319.525,00	69,42%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.542.997.171,00	1.765.319.525,00	69,42%
	1. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	199.997.171,00	188.833.707,00	94,42%
	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.585.000.000,00	982.998.550,00	62,02%
	3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	90.000.000,00	-	0,00%
	4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	668.000.000,00	593.487.268,00	88,85%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
	1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.004.178.239,00	1.973.870.032,00	98,49%
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	124.418.984,00	114.313.603,00	91,88%
	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.948.664,00	22.216.328,00	96,81%
	2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	22.948.664,00	20.066.256,00	87,44%
	3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	26.168.598,00	23.397.308,00	89,41%
	4. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	26.679.812,00	23.989.048,00	89,91%
	5. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.673.246,00	24.644.663,00	95,99%
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	64.430.702,00	55.060.291,00	85,46%
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	9.986.060,00	8.097.037,00	81,08%
	2. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	9.645.314,00	9.534.200,00	98,85%
	3. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	9.861.457,00	8.082.981,00	81,97%
	4. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	14.976.804,00	13.058.126,00	87,19%
	5. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	9.978.303,00	8.188.248,00	82,06%
	6. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	9.982.764,00	8.099.699,00	81,14%
c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.674.123.895,00	1.666.785.154,00	99,56%
	1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.123.895,00	46.557.354,00	94,78%
	2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	875.000.000,00	871.511.800,00	99,60%
	3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	750.000.000,00	748.716.000,00	99,83%
d	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.891.725,00	7.987.830,00	89,83%
	1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.573.381,00	4.302.930,00	94,09%
	2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.318.344,00	3.684.900,00	85,33%
e	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.312.933,00	129.723.154,00	98,04%
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.312.933,00	129.723.154,00	98,04%
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	275.000.000,00	-	0,00%
a	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	275.000.000,00	-	0,00%
	1. Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	275.000.000,00	-	0,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38.855.297.139,00	22.435.849.123,00	57,74%
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	38.855.297.139,00	22.435.849.123,00	57,74%
	1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	38.614.844.829,00	22.195.460.831,00	57,48%
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	240.452.310,00	240.388.292,00	99,97%
	JUMLAH	55.832.355.418,00	36.792.535.395,00	65,90%

Penyerapan dana dari program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur terserap **65,90%** dari anggaran yang ditetapkan sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Hal ini karena masih banyak kegiatan yang belum terealisasi keuangannya dan masuk kedalam tunda bayar yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan peningkatan indeks kepuasan layanan infrastruktur perumahan dan permukiman.

b. Misi Kelima

Misi Kelima yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi, diwujudkan melalui 1 program dengan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut :

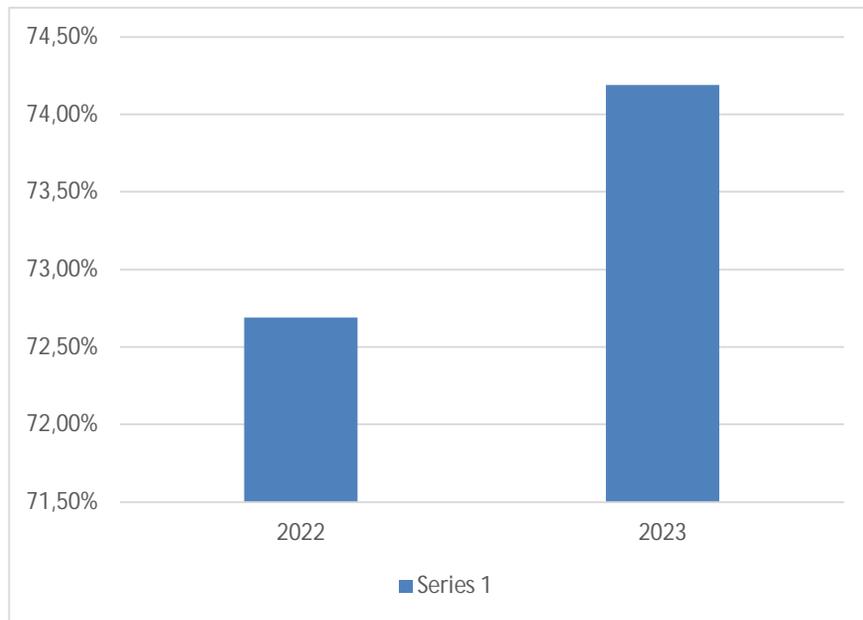
Tabel 3.35.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 5

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023
	Misi 5 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.			
1.	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.36. Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah**

INDIKATOR	HASIL	TAHUN 2023		% Capaian
	2022	Target	Realisasi	
Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	100%
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023				100%



Grafik 2. Capaian Nilai AKIP OPD

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2023 oleh inspektorat nomor : 10/R/LHE/INSP/2023 bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir memperoleh nilai 74,19 atau BB dengan kategori **Sangat Baik**. Sedangkan pada tahun lalu memperoleh nilai 72,69 atau BB. Jika dilihat pada tabel di atas, kinerja sasaran meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah dikategorikan **Sangat Berhasil**. Adapun capaian realisasi keuangan untuk program yang mendukung sasaran strategis misi kelima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37. Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Misi 5

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.639.233.073,00	7.925.961.108,00	91,74%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.989.762,00	342.943.600,00	99,12%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.908.895,00	79.813.800,00	99,88%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.956.111,00	39.313.800,00	98,39%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.165.981,00	48.758.100,00	99,17%
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.956.111,00	39.312.900,00	98,39%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.165.981,00	48.798.100,00	99,25%
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.956.111,00	39.722.500,00	99,42%
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.880.572,00	47.224.400,00	98,63%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.294.907,00	3.769.133.188,00	93,17%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.965.563.131,00	3.707.948.165,00	93,50%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.861.749,00	31.770.608,00	79,70%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.870.027,00	29.414.415,00	73,78%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.892.101,00	46.607.860,00	93,42%
	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.892.101,00	46.607.860,00	93,42%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.607.470,00	211.230.744,00	75,82%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117.301.470,00	115.784.100,00	98,71%
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.306.000,00	95.446.644,00	59,17%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.384.594.788,00	1.380.205.276,00	99,68%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.740.918,00	19.704.240,00	99,81%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.900.333,00	199.610.384,00	99,85%
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	193.659.645,00	193.200.772,00	99,76%
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.226.250,00	154.874.034,00	99,13%
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.766.832,00	72.740.279,00	99,96%
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.073.250,00	10.073.250,00	100,00%
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708.085.000,00	705.872.717,00	99,69%
	8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.142.560,00	24.129.600,00	99,95%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.146.831.933,00	864.309.000,00	75,36%
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	710.784.060,00	469.000.000,00	65,98%
	2. Pengadaan Mebel	107.314.300,00	105.980.000,00	98,76%
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.771.573,00	289.329.000,00	99,50%
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.962.000,00	-	0,00%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.612.112,00	511.807.774,00	92,78%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.009.312,00	84.226.574,00	70,18%
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.047.600,00	130.047.600,00	100,00%
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.555.200,00	285.533.600,00	98,61%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.410.000,00	799.723.666,00	95,61%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.410.000,00	261.500.666,00	88,22%
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	540.000.000,00	538.223.000,00	99,67%
	JUMLAH	8.639.233.073,00	7.925.961.108,00	91,74%

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai **91,74%** dari yang ditargetkan dan sebagian kegiatan ada yang dimatikan pada APBD Perubahan, lalu sisa anggaran di alokasikan untuk mendukung misi ke-1. Namun hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan sangat efektif. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan rutin administrasi perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran sehari-hari, sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung misi ke-5 adapun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel; peningkatan kualitas SDM dapat terwujud dengan bantuan dari OPD lain di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SPIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Tabel 3.37.
Resume Capaian Sasaran Penunjang Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir 2023

MISI	SASARAN	CAPAIAN	KATEGORI
Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	73,41 %	Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 1		73,41 %	Berhasil
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	100 %	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 5		100 %	Sangat Berhasil
Total Rata-rata Capaian Misi Kabupaten Rokan Hilir		86,71 %	Sangat Berhasil

B. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kegiatan mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Penyerapan anggaran berdasarkan Jenis Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38.
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	42.399.586.579	30.706.994.353	72,42%
5 1 01	Belanja Pegawai	3.965.563.131	3.707.948.165	93,50%
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.628.365.548	4.230.297.239	91,40%
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	33.805.657.900	22.768.748.949	67,35%
5 2	BELANJA MODAL	22.072.001.912	14.011.502.150	63,48%
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.153.774.983	864.309.000	74,91%
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.000.000	338.904.000	99,68%
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.578.226.929	12.808.289.150	62,24%
Jumlah Belanja		64.471.588.491	44.718.496.503	69,36%

Dari Tabel 3.5 dapat terlihat bahwa Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 sebesar **69,36%**. Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi tahun 2023 berdasarkan rincian program dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.39.
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	2.542.997.171	1.765.319.525	69,42%
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	976.225.895	819.102.305	83,90%
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.639.233.073	7.925.961.108	91,74%
4	Program pengembangan perumahan	2.004.178.239	1.973.870.032	98,49%
5	Program kawasan permukiman	275.000.000	-	0,00%
6	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	11.178.656.974	9.798.394.410	87,65%
7	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	38.855.297.139	22.435.849.123	57,74%
JUMLAH		64.471.588.491	44.718.496.503	69,36%

Berdasarkan dari tabel di atas, secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa program sangat rendah mulai dari 57,74% - 0%. Hal ini karena masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang realisasi keuangannya belum terlaksana, sehingga mengakibatkan terjadinya tunda bayar.

C. EVALUASI KINERJA

Belum tercapainya indikator sasaran pada umumnya dipengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- 1) Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian.
- 2) Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD 2023, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang menunggu keputusan kepala daerah dalam penyalarsan program, tugas dan fungsi antar OPD.
- 3) Proses rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada output capaian kegiatan.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 5) Terdapatnya kegiatan-kegiatan yang realisasi keuangannya belum terlaksana, sehingga mengakibatkan terjadinya tunda bayar.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan harmonisasi penganggaran.
- 2) Solusi untuk permasalahan ketiga sudah diambil langkah oleh BAPPEDA Rokan Hilir untuk penyalarsan program antar OPD yang memiliki fungsi serupa berupa Rapat Sinkronisasi dan Penyalarsan Program yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyalarsan Program Antar OPD.
- 3) Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 mencapai **86,71%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

B. SARAN

Tahun Anggaran 2023 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2023 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2023 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2024 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2023 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2023.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

Bagansiapiapi, 25 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE., M.Si

NIP. 19690201 198903 1 001

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023**

PENGARAH/PEMBINA : BUDI MULIA, SE., M.Si
PENANGGUNG JAWAB : YUNI HARSI, SE
KETUA : RIO SAPUTRA, ST
SEKRETARIS : ASMADI, ST
ANGGOTA : ELISA MARTINA SIHOMBING, SPWK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. BAGANSIPIPI TELP.(0767) FAX.(0767)

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur.	Persentase capaian pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman.	78%
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah.	Nilai AKIP OPD.	BB

Bagansiapiapi, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP. (0767) FAX. (0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI MULIA, SE., Msi
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 30 November 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI ROKAN HILIR,



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	Persentase capaian pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman	78%
2	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	= 2.542.997.171	APBD-P
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	= 976.225.895	APBD-P
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	= 8.639.233.073	APBD-P
4 Program Pengembangan Perumahan	= 2.004.178.239	APBD-P
5 Program Kawasan Permukiman	275.000.000	APBD-P
6 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	= 11.178.656.974	APBD-P
7 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	= 38.855.297.139	APBD-P

Bagansiapiapi, 30 November 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

BUPATI ROKAN HILIR,



FRIZAL SINTONG



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI HARDI, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001



PIHAK PERTAMA,
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



YUNI HARDI, SE
Pembina / IVb
NIP. 19700611 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD.	BB

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	= 8.765.391.962	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= 279.692.777	

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 39.956.111 APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD = 39.956.111 APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD = 39.956.111 APBD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD = 39.956.111 APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD = 39.956.111 APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = 39.956.111 APBD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = 39.956.111 APBD

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= 4.369.659.291	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	= 4.225.762.104	APBD
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.715.685	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	= 39.861.749	APBD
	- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.449.726	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	= 39.870.027	APBD

3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	= 49.892.101	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	= 49.892.101	APBD

4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= 265.901.470	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	= 117.301.470	APBD
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	= 148.600.000	APBD

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= 1.411.297.338	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	= 19.740.918	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= 199.900.333	APBD
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	= 193.659.645	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	= 156.226.250	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	= 72.766.832	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.175.800	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	= 720.685.000	APBD
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	= 24.142.560	APBD

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= 1.129.131.873	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	= 731.046.000	APBD
	- Pengadaan Mebel	= 107.314.300	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	= 290.771.573	APBD

7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= 551.612.112	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	= 12.000.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	= 120.009.312	APBD
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= 130.047.600	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	= 289.555.200	APBD

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= 708.205.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	= 168.205.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	= 540.000.000	APBD

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


BUDI MULIA, SE., M.Si
 Pembina Tingkat I / IVb
 NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


YUNI HARDI, SE
 Pembina / IVb
 NIP. 19700611 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGULUS YURA ANGGARA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



REGULUS YURA ANGGARA, ST
Penata / IIIc
NIP. 19860713 201503 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	78%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Perumahan	= 2.342.476.691	APBD
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	= 10.636.656.974	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 124.418.984	
a.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 22.948.664	APBD
b.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	= 22.948.664	APBD
c.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	= 26.168.598	APBD
d.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	= 26.679.812	APBD
e.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 25.673.246	APBD
2.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 64.430.702	
a.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	= 9.986.060	APBD
b.	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	= 9.645.314	APBD
c.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	= 9.861.457	APBD
d.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	= 14.976.804	APBD
e.	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	= 9.978.303	APBD
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	= 9.982.764	APBD
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 1.974.123.895	
a.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 49.123.895	APBD
b.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	= 875.000.000	APBD
c.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 1.050.000.000	APBD
4.	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 28.900.177	
a.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 14.581.514	APBD
b.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	= 14.318.663	APBD
5.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.602.933	
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	= 150.602.933	APBD
6.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	= 10.636.656.974	

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha	=	10.636.656.974	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Ibu Sumiati Jalan Sidomulyo RT. 029 RW. 009 Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Riani Novitasari Jalan Pulau Baru Gg. Jasa Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Sarjo Dusun Pujud Pekan RT.001 RW. 002 Desa Pujud Kec. Pujud	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Dedi Armi Dusun Ampaian Rotan RT. 004 RW. 001 Desa Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Raya	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Nurrapiansyah Dusun Mekar Jaya RT. 013 RW. 012 Desa Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Raya	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Apri Susanto Jl. R.A Kartini RT. 001 RW. 008 Desa Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Aprizal Jl. H. Imam Munandar RT. 003 RW. 002 Desa Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Jupensius Roynaldo Sihalohe Jl. Kartini RT. 005 RW. 008 Desa Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni LB. Boing Limbles Bernov Jl. R.A Kartini RT. 002 RW. 008 Desa Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Sri Priatin Jl. R.A Kartini RT.005 RW. 008 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah	=	119.840.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni se- Kabupaten Rokan Hilir	=	2.516.640.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni Bapak Sulino RT.011/RW.004Kec. Bangko Pusako Dusun Mulyo Rejo Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	112.000.000	APBD
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara Swadaya se-Kabupaten Rokan Hilir(Swakelola)	=	2.400.000.000	APBD
- Pembangunan Rumah Layak Huni (Bankeu Prov)	=	4.000.000.000	APBD
- Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah Layak Huni Bantuan Keuangan Provinsi	=	70.000.000	APBD
- Biaya Penunjang	=	339.616.974	APBD

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


BUDI MULIA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


REGULUS YURA ANGGARA, ST
Penata /III.c
NIP. 19860713 201503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNAENI NOOR WULAN, ST
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**KEPALA BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


ISNAENI NOOR WULAN, ST
Pembina / IVa
NIP. 19751021 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	78%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	= 1.784.997.171	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	= 986.242.924	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	= 1.784.997.171	
a.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	= 199.997.171	APBD
	- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	= 199.997.171	APBD
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	= 985.000.000	APBD
	- Pembangunan Sumur Bor Kep. Bagan Sinembah Utara, Kec. Bagan Sinembah Raya	= 200.000.000	APBD
	- Pembangunan Sumur Bor Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah	= 200.000.000	APBD
	- Pembangunan Sumur Bor Gereja HKBP Jl. Gereja RT. 02 RW. 02	= 185.000.000	APBD
	- Pembangunan sumur bor Masjid Al-litihadiyah Kel. Teluk Pulau Kec.	= 200.000.000	APBD
	- Pembangunan sumur bor Kuala RT. 10, RT. 24 dan RT. 04 Kep.	= 200.000.000	APBD
c.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	= 600.000.000	APBD
	- Hibah Air Minum Perdesaan	= 600.000.000	APBD
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	= 986.242.924	
a.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	= 986.242.924	APBD

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR


BUDI MULIA, SE., M.Si
 Pembina Tingkat I / IVb
 NIP. 19690201 198903 1 001

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023
 Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR


ISNAENI NOOR WULAN, ST
 Pembina/IV.a
 NIP. 19751021 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUDRI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



PIHAK PERTAMA,
**Pt. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

KUDRI, ST
Penata VIII.c
NIP. 19850107 201408 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	78%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	= 28.530.469.871	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	= 28.530.469.871	
a.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	= 28.290.017.561	APBD
	Jalan	= 8.426.156.600	
	- Peningkatan Jalan Kundur Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 4 Kep. Tanjung Medan Utara Kec. Tanjung Medan	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Munawar Kep. Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Produksi Dusun Sulun Kel. Simpang Kanan Kec.	= 99.996.900	APBD
	- Peningkatan Jalan Dusun Mulia RT.01/RW.05 Kep. Bukit Damar Kec. Simpang Kanan	= 169.990.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Sulun RT. 003 RW. 005 Kel. Simpang Kanan	= 149.988.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Perkebunan Puskrof Kep. Kencana Kec. Balai Jaya	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Raja Ali Haji Kep. Harapan Makmur Kec. Bagan Sinembah Raya	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Tukul Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Karya Bakti Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 194.993.300	APBD
	- Peningkatan Jalan Lapangan Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 199.993.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Muslimin Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 199.993.800	APBD
	- Peningkatan Jalan RT. 07 s/d RT.10 Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 199.993.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Setia Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 199.993.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Tesfram Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	= 199.993.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Kelompok 2 Dusun Suka Jadi Kep. Pelita Kec. Bagan Sinembah	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Kelompok 3 Dusun Suka Jadi Kep. Pelita Kec. Bagan Sinembah	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Dusun Tanjung Rejo Kep. Tanjung Sari Kec. Tanjung Medan	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan H. Mansur Teluk Kotak Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Suka Mulia Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Dusun 05 Sido Bangun RT.02/RW.02 Kep. Srikayangan Kec. Tanjung Medan	= 194.990.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Gg. Makmur RT.09/RW.02 Dusun Berkat Hulu Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih	= 199.989.000	APBD
	- Peningkatan Jalan Utama Sosopan Dusun 6 RT.02/RW.01 Kep. Pujud Kec. Pujud	= 194.990.800	APBD
	- Peningkatan Jalan Timur RW.06 Dusun Karya Kep. Menggala Sempurna Kec. tanah Putih	= 194.990.800	APBD

- Peningkatan Jalan Sukajadi RT.10/RW.04 Kep. Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko	=	184.992.300	APBD
- Peningkatan Jalan Lancang Kuning GG. Durian Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Raya	=	184.994.400	APBD
- Peningkatan Jalan Dusun Lestari Kel. Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan	=	199.989.000	APBD
- Peningkatan Jalan Dusun Kampung Tiga Kel. Pujud Kec. Pujud	=	199.989.000	APBD
- Peningkatan Jalan Dusun II Kel. Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan	=	199.989.000	APBD
- Peningkatan Jalan Nirwana RT.07/RW.04 Kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko	=	199.993.800	APBD
- Peningkatan Jalan Rambutuan Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya	=	194.990.800	APBD
- Peningkatan Jalan Dusun Simpang Pujud RT.012/RW.004 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	=	194.990.800	APBD
- Peningkatan Jalan Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah	=	194.990.800	APBD
- Peningkatan Jalan Suka Maju RT.001/RW.003 Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah	=	194.990.800	APBD
- Peningkatan Jalan Kamboja RT 002 RW 004 Dusun Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Raya	=	199.989.000	APBD
- Peningkatan Jalan Kasturi Kep. Pelita Kec. Bagan Sinembah	=	199.989.000	APBD
- Peningkatan Jalan Siak Gang Darma RT.009 RW.003 Kel. Bagan Timur Kec. Bangko	=	129.999.900	APBD
- Peningkatan Jalan Gg. Lemang RT.001/RW.004 Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	184.994.400	APBD
- Peningkatan Jalan Cempaka RT.029/RW.010 Dusun Sido Makmur Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	186.000.000	APBD
- Peningkatan Jalan Berkah RT.13/RW.013 Dusun Mulyo Rejo Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	186.000.000	APBD
- Peningkatan Jl. Kilang RT.012/RW.004 Dusun Mulyo Rejo Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	241.800.000	APBD
- Peningkatan Jalan Tolu RT.19/RW.09 Dusun Boutrem Jaya Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	176.700.000	APBD
- Peningkatan Jl. As Saroh RT.002/RW.001 Dusun Antara Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako (Swakelola-TMMD)	=	186.000.000	APBD
- Peningkatan Jalan Cendrawasih RT.002/RW.005 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	=	184.994.400	APBD
Jembatan	=	1.766.700.000	
- Pembangunan Box Culvert SP. 5 RT. 14 RW. 06 Kep. Karya Mulyo Sari Kec. Pekaitan	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvet Jalan Lokomotif Menuju Bantaian Baru Kep. Bantaian Baru Kec. Batu Hampar	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Jalan Pasar N15 Kep. Karya Mulya Sari Kec. Pekaitan	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert SK 3 Kep. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko	=	195.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Jalan Jaya Ujung Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Dusun 05 Sido Bangun RT. 02 RW. 02 Kep. Sri kayangan Kec. Tanjung Medan	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Jalan Banjarsari RT. 025 RW. 009 Kep. Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang	=	195.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Mesjid Ashshofa Kep. Rokan Baru Kec. Pekaitan	=	200.000.000	APBD
- Pembangunan Box Culvert Jl. Talon Sejati RT.034/RW.011 Dusun Boutrem Jaya Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako (Swakelola-	=	176.700.000	APBD
Drainase	=	2.634.910.961	
- Pembangunan Drainase Dusun Suka Damai Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	=	169.990.427	APBD
- Pembangunan Drainase Dusun Mulia RT.01/RW.05 Kep. Bukit Damar Kec. Simpang Kanan	=	159.996.648	APBD

- Pembangunan Drainase Jalan Kampung Harapan Kel. Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan Sinembah Raya	=	199.994.197	APBD
- Pembangunan Drainase Jalan Bahagia Gg. Zamsuria Kel. Bagan Timur Kec. Bangko	=	119.997.486	APBD
- Peningkatan Drainase Jalan Teratai Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah	=	199.994.197	APBD
- Pembangunan Drainase Kep. Bagan Bakti Kec. Balai Jaya	=	194.988.828	APBD
- Pembangunan Drainase Jalan Kemiri Dusun Sejahtera Kep. Bagan Septa Permei Kec. Bagan Sinembah	=	194.988.828	APBD
- Pembangunan Drainase RT. 01 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	=	184.989.699	APBD
- Pembangunan Drainase RT. 02 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	=	184.989.699	APBD
- Peningkatan Drainase Jalan Karya RT. 005 RW. 002 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	184.999.130	APBD
- Pembangunan Drainase Jalan Pelabuhan Baru Gang MDA Al-Iklas Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	139.997.067	APBD
- Pembangunan Drainase Jl. H. Imam Munandar RT. 001 RW.001 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	=	179.995.939	APBD
- Pembangunan Drainase Dusun Anugerah RT.001 RW.001 Kep. Bagan Septa Permai Kec. Bagan Sinembah	=	179.995.939	APBD
- Pembangunan Drainase Jl. Siak Gg. Faqih Yunus Kel. Bagan Timur Kec. Bangko	=	179.996.229	APBD
- Pembangunan Drainase Jalan Pusara Gg. Umar RT.004/RW.002 Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko	=	159.996.648	APBD
Rumah Ibadah	=	14.462.250.000	
- Peningkatan Mushalla Al-Ikhsan Jl. Nelayan RT. 04 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Syuhada Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al-Barkat RT. 05 RW 02. Kel. Bagan Punak Kec. Bangko	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Ibadah se-Kabupaten Rokan Hilir	=	250.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al-Fajar Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar	=	195.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Ibadah Kepenghuluan Rokan Baru, Kec. Pekaitan	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Muthmainnah Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Al- Hidayah Kep. Bantaian Baru Kec. Batu Hampar	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Al Ikhlas Jalan H. Imam Munandar Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Ibadah Kel. Bagan Timur Kec. Bangko	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Al-Barokah RT.014 RW. 005 Dusun Sidodadi Kep. Bangko Mukti Kec. Bangko	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al-Ikhlas RT. 004 RW. 001 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Alhidayah Gg. Mawar Suka Rukun Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah	=	195.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Almanshurin Jalan Bakti Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi	=	214.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Ibadah Jalan Tanjung Masjid Kep. Rantau Kec. Kubu Babussalam	=	100.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Al-Ikhlas Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Suluk Hidayatussholihin Kep. Menggala Sakri Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Istiqomah Jalan Impah Kep. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Jamil Muslimin Kep. Sintong Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD

- Peningkatan Masjid Nurul Iman Kel. Balam Sempurna Kota, Kec. Balai Jaya	=	2.600.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid An-Nur Jl. Pulau Baru Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko	=	800.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al Falah Jl. Bangko (Simpang Sekip) Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	=	700.000.000	APBD
- Peningkatan Rumah Ibadah Musholla Hidayah Jl. Talon Sejati RT.034/RW.011 Dusun Boutrem Jaya Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako (Swakelola)	=	158.250.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al-Fath Jalan Siak Kel. Bagan Timur Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Mesjid Ar-Ridho Jl. Perniagaan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	=	1.000.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Addinul Islam Kep. Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al - Abror Jl. Pusara Hilir Gg. Madi Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Al-Iman Jl. Gajah Mada Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Nurul Fallah Jl. Baik-baik RT.022 RW.006 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Musholla Mardotillah Jl. Musholla Gg. Musholla I Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko	=	150.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid Raudatul Falah Kep.Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako	=	2.600.000.000	APBD
- Peningkatan Masjid An- Nur Kep. Sintong Bakti Kec. Tanah Putih	=	2.000.000.000	APBD
Pemakaman	=	1.000.000.000	
- Peningkatan TPU Kampung Tengah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan TPU Dalam Boltrem Kep.Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Raya	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan TPU Muslim Dalam Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Raya	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan TPU Dusun Bunut Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya	=	200.000.000	APBD
- Peningkatan TPU Kep. Sintong Kec. Tanah Putih	=	200.000.000	APBD
b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	=	240.452.310	APBD

Bagansiapiapi, 01 Maret 2023
Pihak Pertama

**Pit. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


BUDI MULIA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690201 198903 1 001


KUDI, ST
Penata /III.c
NIP. 19850107 201408 1 002

**Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 oleh inspektorat
Nomor : 10/R/LHE/INSP/2023**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023, memperoleh nilai total sebesar 74,19 termasuk dalam katagori “BB”. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,10	7,20	12,00	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	4,50	6,66	10,80	21,96
3.	Pelaporan Kinerja	15	2,22	3,33	5,25	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,70	5,25	8,13	17,13
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	15,57	22,44	36,18	74,19

Tabel Laporan e-Monev Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI FISIK		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEUANGAN		
1 Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	I PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator : Persentase Peningkatan Layanan Air Minum di Perumahan dan Kawasan Permukiman			2.542.997.171	1.765.319.525		69,42%		
	A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air			2.542.997.171	1.765.319.525		69,42%		
	1 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	199.997.171	188.833.707	100%	94,42%	Tidak Ada	
	2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8 Unit	8 Unit	1.585.000.000	982.998.550	100%	62,02%	Beberapa kegiatan dilakukan tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya
	3 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5 Unit	0 Unit	90.000.000	-	0,00%	0,00%	Waktu pelaksanaan di APBD Perubahan sangat	Tidak dilaksanakan
4 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	301 Unit SR	301 Unit SR	668.000.000	593.487.268	100%	88,85%	Tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya	
2 Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator : Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik di Perumahan dan Kawasan Permukiman			976.225.895	819.102.305		83,90%		
	A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			976.225.895	819.102.305		83,90%		
	1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	85 Unit	85 Unit	976.225.895	819.102.305	100%	83,90%	Beberapa kegiatan dilakukan tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya
3 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan			8.639.233.073	7.925.961.108		91,74%		
	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			345.989.762	342.943.600		99,12%		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	79.908.895	79.813.800	100%	99,88%	Tidak Ada	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.956.111	39.313.800	100%	98,39%	Tidak Ada	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.165.981	48.758.100	100%	99,17%	Tidak Ada	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.956.111	39.312.900	100%	98,39%	Tidak Ada	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.165.981	48.798.100	100%	99,25%	Tidak Ada	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	39.956.111	39.722.500	100%	99,42%	Tidak Ada	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	47.880.572	47.224.400	100%	98,63%	Tidak Ada	
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.045.294.907	3.769.133.188		93,17%			
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	3.965.563.131	3.707.948.165	100%	93,50%	Tidak Ada		
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.861.749	31.770.608	100%	79,70%	Tidak Ada		
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	39.870.027	29.414.415	100%	73,78%	Tidak Ada		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI FISIK		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEUANGAN		
	C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49.892.101	46.607.860		93,42%		
	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.892.101	46.607.860	100%	93,42%	Tidak Ada	
	D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			278.607.470	211.230.744		75,82%		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112 Paket	112 Paket	117.301.470	115.784.100	100%	98,71%	Tidak Ada	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	9 Orang	161.306.000	95.446.644	56,25%	59,17%	Tidak Ada	
	E Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.384.594.788	1.380.205.276		99,68%		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	19.740.918	19.704.240	100%	99,81%	Tidak Ada	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	199.900.333	199.610.384	100%	99,85%	Tidak Ada	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	193.659.645	193.200.772	100%	99,76%	Tidak Ada	
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	156.226.250	154.874.034	100%	99,13%	Tidak Ada	
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	72.766.832	72.740.279	100%	99,96%	Tidak Ada	
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.073.250	10.073.250	100%	100,00%	Tidak Ada	
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	708.085.000	705.872.717	100%	99,69%	Tidak Ada	
	8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	24.142.560	24.129.600	100%	99,95%	Tidak Ada	
	F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			1.146.831.933	864.309.000		75,36%		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	1 Unit	710.784.060	469.000.000	100%	65,98%	Tidak Ada	
	2 Pengadaan Mebel	27 Unit	27 Unit	107.314.300	105.980.000	100%	98,76%	Tidak Ada	
	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket	4 Paket	290.771.573	289.329.000	100%	99,50%	Tidak Ada	
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	37.962.000	-	100%	0,00%	Tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya
	G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			551.612.112	511.807.774		92,78%		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	100%	100,00%	Tidak Ada	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	120.009.312	84.226.574	100%	70,18%	Tidak Ada	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	130.047.600	130.047.600	100%	100,00%	Tidak Ada	
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	289.555.200	285.533.600	100%	98,61%	Tidak Ada	
	H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			836.410.000	799.723.666		95,61%		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	296.410.000	261.500.666	100%	88,22%	Tidak Ada	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	540.000.000	538.223.000	100%	99,67%	Tidak Ada	

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI FISIK		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEUANGAN		
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator : Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2.004.178.239	1.973.870.032		98,49%		
	A Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban			124.418.984	114.313.603		91,88%		
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	22.948.664	22.216.328	100%	96,81%	Tidak Ada	
	2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.948.664	20.066.256	100%	87,44%	Tidak Ada	
	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	26.168.598	23.397.308	100%	89,41%	Tidak Ada	
	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	26.679.812	23.989.048	100%	89,91%	Tidak Ada	
	5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.673.246	24.644.663	100%	95,99%	Tidak Ada	
	B Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi			64.430.702	55.060.291		85,46%		
	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	9.986.060	8.097.037	100%	81,08%	Tidak Ada	
	2 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.645.314	9.534.200	100%	98,85%	Tidak Ada	
	3 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	1 Dokumen	1 Dokumen	9.861.457	8.082.981	100%	81,97%	Tidak Ada	
	4 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 Dokumen	1 Dokumen	14.976.804	13.058.126	100%	87,19%	Tidak Ada	
	5 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	9.978.303	8.188.248	100%	82,06%	Tidak Ada	
	6 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.982.764	8.099.699	100%	81,14%	Tidak Ada	
	C Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana			1.674.123.895	1.666.785.154		99,56%		
	1 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	49.123.895	46.557.354	100%	94,78%	Tidak Ada	
	2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7 Unit	7 Unit	875.000.000	871.511.800	100%	99,60%	Tidak Ada	
3 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	750.000.000	748.716.000	100%	99,83%	Tidak Ada		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI FISIK		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	
		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEUANGAN			
	D Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban			8.891.725	7.987.830		89,83%			
	1 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.573.381	4.302.930	100%	94,09%	Tidak Ada		
	2 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.318.344	3.684.900	100%	85,33%	Tidak Ada		
	E Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan			132.312.933	129.723.154		98,04%			
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	132.312.933	129.723.154	100%	98,04%	Tidak Ada		
5	Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	V PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator : Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			275.000.000	-		0,00%		
	A Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			275.000.000	-		0,00%			
	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	-	100%	0,00%	Tunda bayar	Dilakukan pembayaran	
6	Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator : Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			11.178.656.974	9.798.394.410		87,65%		
	A Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			11.178.656.974	9.798.394.410		87,65%			
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	208 Unit	195 Unit	11.178.656.974	9.798.394.410	94%	87,65%	Tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya	

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI FISIK		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN		
		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEUANGAN				
7	Peraturan Menteri PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No. 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum	VII	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN - Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Peningkatan Jembatan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Penyediaan Penerangan Jalan di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Peningkatan Drainase Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rumah Ibadah di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Perumahan dan Kawasan Permukiman - Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman di Perumahan dan Kawasan Permukiman			38.855.297.139	22.435.849.123		57,74%		
		A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			38.855.297.139	22.435.849.123		57,74%		
			1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	168 Lokasi	106 Lokasi	38.614.844.829	22.195.460.831	63,10%	57,48%	Tunda bayar	Dilakukan pembayaran ditahun berikutnya
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Tahun	1 Tahun	240.452.310	240.388.292	100%	99,97%	Tidak Ada	
			TOTAL			64.471.588.491	44.718.496.503		69,36%		